

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Samah dan Ali Bi Embi, *Hukum Pemerintah Daerah dan Desa di Indonesia*, Pekanbaru: 2016
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2018*, Kabupaten Kepulauan Meranti, 2018
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka cipta, 2008
- E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006
- Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Meldona dan Siswanto, *Perencanaan Tenaga Kerja*, Malang: UIN MALIKI Press, 2011
- Moheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Perspektif Pembangunan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003

Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001

Sodang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

KARYA ILMIAH

Ami Ade Maesyarah, Skripsi : *Analisis Efektivitas Peranan Balai Latihan Kerja (BLK) Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung: UIN RADEN INTAN, 2018
 (diakses pada 10 April 2019)

Gusty Kacil, skripsi: *Peranan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Skill Tenaga Kerja Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Pekanbaru: UIN SUSKA, 2014

INTERNET

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/02/27/dpmpsptk-meranti-akui-banyak-warganya-kerja-di-malaysia> (diakses pada 23 september 2018, pukul 19.50)